



Buletin Parlementaria

Nomor 1157/I/VII/2021 • Juli 2021

DPR Puji Aksi Satgultor TNI Tumpas Aksi Teroris



3 Industri Pertahanan Nasional Ujung Tombak Sistem Pertahanan Mandiri



4 Banyak Varian Baru Corona, Perketat Pintu Masuk RI



9 772614 339005



BULETIN

DPR Puji Aksi Satgultor TNI Tumpas Aksi Teroris di

Satuan Penanggulangan Teror (Satgultor) TNI melalui pendudukan disertai kecepatan dengan akurasi yang tinggi berhasil mengambil alih Gedung DPR RI dari penguasaan para teroris sekaligus sukses menyelamatkan sejumlah pejabat negara dari aksi penyanderaan kelompok teroris yang menguasai Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (27/6).

Aksi pengambilalihan Gedung DPR RI berlangsung secara dramatis, cepat dan dahsyat serta dapat melumpuhkan aksi penyanderaan yang dilakukan kelompok teroris tanpa menimbulkan korban jiwa pejabat negara yang disandera tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Korinbang Rachmat Gobel yang hadir langsung menyaksikan aksi itu, memberikan apresiasi kepada seluruh personel TNI yang hadir dan terlibat dalam skenario latihan, atas komitmennya untuk tetap siap siaga menghadapi teroris di tengah pandemi Covid-19. Ia optimistis terhadap kesiapan TNI dalam mengantisipasi aksi terorisme ke depannya.

“Kita bisa melihat bagaimana alutsista yang dimiliki oleh TNI untuk mengatasi persoalan ancaman terorisme yang dihadapinya. Mereka mengantisipasi para teroris yang ada, tentu TNI harus memiliki peralatan lebih canggih dari teroris sendiri, kalau kalah canggih kita *nggak* dilihat nanti, dalam negosiasi pun *nggak* dianggap. Itulah mungkin (alutsista TNI) dari Komisi I DPR RI harus mendapatkan perhatian yang lebih bagus,” ungkap Gobel.

Politisi Partai Nasdem ini menambahkan komitmen dan integritas TNI dalam mengantisipasi aksi terorisme harus didukung penuh oleh DPR RI.



Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel bertukar cenderamata usai menyaksikan aksi Satgultor TNI. Foto: Ojji/mvi

Gobel tetap mengingatkan semangat gotong royong antara TNI, DPR dan warga sipil untuk bahu membahu menangani pandemi Covid-19. Dirinya juga berharap sinergi seluruh pemangku kebijakan dalam akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

“Di tengah pandemi Covid momentum kita harus bangun, mengambil kesempatan untuk membangun ekonomi kita, apalagi semua negara sedang menghadapi masalah ekonomi yang besar karena pandemi Covid. Untuk itu rakyat dan TNI harus bersatu, kita jangan tergiur ataupun lengah menghadapi dengan pandemi Covid ini sendiri,” pungkas legislator dapil Gorontalo itu.

Dalam kesempatan yang sama, Dankoopssus TNI Mayjen TNI Richard T.H Tampubolon menyebutkan penguasaan Gedung Nusantara dan pembebasan sandera oleh Satgultor TNI dari aksi terorisme adalah bagian dari skenario latihan yang dilaksanakan oleh Koopssus TNI untuk menguji kesiapsiagaan Satgultor TNI dalam melaksanakan operasi penanggulangan terorisme guna menghadapi berbagai ancaman teror yang setiap saat terjadi.

Drama penyanderaan, pembebasan sandera dan pengambilalihan gedung DPR RI oleh Satgultor TNI disaksikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gobel didampingi Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo. ■ oji/sf

Industri Pertahanan Nasional Ujung Tombak Sistem Pertahanan Mandiri



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani bertukar cenderamata usai memberikan kuliah umum dan pembekalan kepada Perwira Siswa Seskoad di Tribun Gedung E Mabes TNI AD. Foto: Kresno/nvl

Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyampaikan pentingnya menguatkan industri pertahanan dalam negeri sebagai salah satu cara memenuhi ketersediaan peralatan pertahanan nasional. Menurut Puan, hal itu adalah komitmen yang harus diwujudkan sesuai UU Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Puan menjelaskan, UU Industri Pertahanan dibentuk untuk mewujudkan ketersediaan alat peralatan pertahanan dan keamanan secara mandiri yang didukung kemampuan industri pertahanan nasional dan memajukan keunggulan sumber daya manusianya.

"Industri pertahanan menjadi salah satu ujung tombak dalam mengembangkan sistem pertahanan secara mandiri, untuk memenuhi kualitas dan kuantitas alutsista yang sesuai dengan karakteristik kewilayahan dan potensi ancaman yang dihadapi, juga untuk membangun *deterrence effect* terhadap negara lain," kata Puan

saat memberikan kuliah umum dan pembekalan kepada Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler ke-60 Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad), di Tribun Gedung E Mabes TNI AD, Jakarta, Selasa (29/6).

Industri pertahanan nasional saat ini, kata Puan, masih memiliki keterbatasan kapasitas produksi dan penguasaan teknologi militer. Oleh karena itu, pembangunan industri pertahanan nasional diperlukan strategi diplomasi yang kuat, terutama dengan negara-negara yang lebih dulu unggul di bidang teknologi militer. Di sisi lain, ia juga menegaskan bahwa diplomasi Indonesia harus teguh pada prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif.

"DPR juga berkomitmen tinggi untuk terus meningkatkan kesejahteraan prajurit, yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, punya rumah dan anak-anak prajurit bisa sekolah. Bagaimana prajurit bisa tenang di garda terdepan kalau keluarganya *nggak* sejahtera?" tanya legislator dapil Jateng V itu. ■ **ann/sf**



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak)

Suciati, S.Sos. (Kasubag Media Analisis)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag MedSos dan Website)

REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Andi Nurul Naual, Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos, Erlangga Panji Samudro, S.Ikom, Alfi Widoretno, S.I.Kom, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Deslianti, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patulli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum Alaydrus

FOTOGRAFER

Prima Danuritto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Annanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyawati, Rosnita

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

STAF PRODUKSI

Subadri, S.E, Barliansyah

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito

PHOTOGRAFER ART

Frederick Munchen

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Siti Nur Aidah S.A.P., M.AP, Isfandi Mulyana, Yudi Kresna, Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunnisa

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Arif, Lamin, Yuliana Puspita

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO

DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Banyak Varian Baru Corona, Perketat Pintu Masuk RI

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar menekankan pengawasan super ketat di setiap pintu kedatangan warga negara asing (WNA) maupun Warga Negara Indonesia (WNI) dari luar negeri, baik di bandara, pelabuhan, maupun pintu masuk perbatasan.

Hal ini terkait dengan peredaran varian baru virus Corona di Indonesia sebagian besar berasal dari luar

”

KUNCINYA ADALAH PENGAWASAN DI SETIAP PINTU MASUK HARUS DIPERKETAT. KITA SEMUA TENTU SAJA TIDAK INGIN TIBA-TIBA ADA PENULARAN LOKAL VARIAN BARU DARI LUAR NEGERI, PADAHAL NGGAK TAHU KAPAN MASUKNYA (DAN) SIAPA YANG BAWA

negeri, seperti varian Delta yang disebut asal India, varian B.1.1.7 dari Inggris, dan teranyar varian Lambda yang disebut WHO sudah terdeteksi setidaknya di 29 negara.

“Semua pintu masuk harus dijaga super ketat. Setiap yang masuk ke Indonesia harus betul-betul dicek hasil Swabnya dan karantina 14 hari wajib dioptimalkan,” kata Gus Muhaimin dalam keterangan pers kepada *Parlementaria*, Rabu (30/6).

Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Covid-19 DPR RI ini mengusulkan pengetatan lebih optimal utamanya bagi WNA dan WNI yang tiba dari negara berpotensi tinggi tularkan Covid varian baru. “Kuncinya adalah pengawasan di setiap pintu masuk harus diperketat. Kita semua tentu saja tidak ingin tiba-tiba ada penularan lokal varian baru dari luar negeri, padahal nggak tahu kapan masuknya (dan) siapa yang bawa,” tegas Gus Muhaimin.

Selain itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga mendesak Pemerintah Indonesia lebih gesit mendeteksi varian baru virus Corona. Terlebih ada beberapa varian yang disebut lebih cepat menyebar dan berpotensi membuat vaksin jenis tertentu tidak efektif.

Untuk mengoptimalkannya, Gus Muhaimin meminta pemerintah Indonesia menambah jumlah laboratorium yang bisa melakukan *whole genome sequencing* (WGS) untuk mengetahui varian Covid-19. “Sekarang ini di Indonesia baru ada 17 laboratorium yang bisa mendeteksi varian virus baru. Sudah waktunya itu ditambah biar deteksinya lebih cepat,” tukas legislator dapil Jatim VIII itu. ■ **tn/es**



Wakil Ketua DPR RI
Abdul Muhaimin Iskandar.
Foto: Oji/nvl



Pemerintah Dinilai Tak Konsisten, RUU PDP Terancam *Deadlock*

Komisi I DPR RI telah melaksanakan konsinyering dalam rangka membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP). Namun, konsinyering ditutup dengan tidak tercapainya titik temu antara Panitia Kerja (Panja) DPR RI dan Panja Pemerintah. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menjelaskan, kelanjutan pembahasan RUU PDP menunggu iktikad baik dari pemerintah.

“Panja DPR menilai Panja Pemerintah tidak serius dan tidak konsisten dengan kesepahaman yang sudah disepakati berkaitan dengan kelembagaan. Hal ini dibuktikan dengan paparan yang disampaikan oleh Panja Pemerintah tentang kelembagaan, yang mana sangatlah berbeda dengan yang sebelumnya dipahami bersama,” jelas Kharis saat memberikan pernyataan pers mewakili Panja RUU PDP Komisi I DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (1/7).

Kharis menuturkan terdapat perbedaan sikap antara Komisi I DPR dengan Pemerintah terkait penempatan lembaga otoritas pengawas data pribadi. Awalnya, lanjut Kharis, Komisi I DPR RI dan Panja Pemerintah memiliki kesepahaman bahwa DPR dan Pemerintah akan menghendaki lembaga yang bertanggungjawab langsung kepada presiden.

Namun, saat dalam pembahasan, Panja Pemerintah yang dipimpin oleh Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak konsisten dengan kesepahaman yang sudah disepakati sebelumnya. Panja

pemerintah justru mengajukan konsep lembaga yang berada di bawah Kominfo.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menilai lembaga atau badan pengawas data pribadi sangat strategis untuk memastikan upaya perlindungan data pribadi bisa berjalan sesuai dengan standar. Ia pun memastikan seluruh Fraksi di DPR sepakat pembentukan badan otorita yang independen.

“Kita ingin memperkuat lembaga ini sehingga betul-betul mampu melakukan perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia, termasuk juga terkait kesetaraan dengan lembaga-lembaga internasional dan negara-negara lain sehingga memungkinkan transfer data dengan negara lain,” terangnya.

Kharis menambahkan, jika pasal terkait kelembagaan ini disepakati maka dalam waktu dekat sejumlah pasal lainnya juga akan bisa disepakati. Dari seluruh total 371 DIM, Komisi I DPR RI telah menyelesaikan pembahasan sebanyak 143 DIM dengan 125 DIM yang telah disetujui dan disepakati, 10 DIM pending, 6 DIM perubahan substansi dan

2 DIM usulan baru, dengan prosentasi sekitar 40 persen. Sedangkan yang belum dibahas berjumlah 228 DIM mayoritas berkaitan dengan Lembaga Pengawas Pelaksanaan UU PDP.

“Jadi 228 DIM ini sangat berkaitan dengan pembentukan kelembagaan. Kalau soal kelembagaan belum bisa diselesaikan maka 228 DIM ini akan menggantung. Sifatnya, kita menunggu niat baik dari pemerintah untuk melanjutkan,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi mengatakan jika berkaca pada negara lain, otoritas pengawas data pribadi berada di lembaga independen. Sebab, lembaga ini akan bertugas mengawasi data pribadi yang ada di lembaga swasta maupun publik.

Menurutnya, lembaga ini akan mewakili Indonesia jika terjadi masalah kebocoran data yang memerlukan perlindungan di luar negeri. “Jika lembaga itu di bawah Kementerian ada risikonya. Sehingga perlu menjadi independen agar ada kesetaraan dengan lembaga lain merujuk kesepakatan internasional seperti APEC Privacy Framework 2015 dan kerangka kerja sama negara lain,” kata Bobby dalam kesempatan yang sama.

“Jadi yang paling utama adalah banyaknya pasal yang merujuk pada lembaga ini, sehingga kalau lembaga ini tidak bisa ditentukan di awal, ini akan berakibat pembahasan di pasal lain akan sulit sekali,” imbuh politisi Partai Golkar itu. ■ ann/sf



Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI memberikan pernyataan pers terkait RUU PDP. Foto: Andri/nvl

Komisi II Minta Kemendagri Tegur Daerah Jika Tidak Anggarkan Insentif Nakes

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim.
Foto: Andri/nvl



menganggarkan intensif tersebut sedangkan 300-an daerah sudah menganggarkan, namun sama sekali belum dicairkan untuk nakes setempat.

“Nakes merupakan pejuang garda terdepan dalam penanganan pandemi Covid-19. Menurut saya, tidak dianggarkannya insentif untuk tenaga kesehatan di sejumlah daerah, menunjukkan bahwa kepala daerah setempat tidak memiliki kepedulian atas situasi pandemi Covid-19,” terang politisi dapil Jawa Tengah VI.

Melihat dari aturan dan prosedur yang mengatur penetapan dan pencairan anggaran insentif nakes, daerah dinilai berbelit dan sulit menjalankan, Luqman berharap Kemendagri dapat segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar dapat segera melakukan revisi atas aturan tersebut.

Luqman melihat, dalam situasi darurat pandemi seperti saat ini, maka aturan-aturan, prosedur penetapan dan pencairan anggaran harus dipermudah tanpa meninggalkan aspek pertanggungjawaban. Menurutnya, hal ini merupakan kewajiban negara untuk memberikan dukungan yang memadai kepada seluruh nakes agar dapat bekerja secara maksimal melayani masyarakat.

“Melonjaknya pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, pasti akan menambah beban kerja nakes semakin berat. Tidak sedikit tenaga kesehatan telah gugur dalam menjalankan tugas menangani pasien-pasien Covid-19,” imbuh Ketua Bidang Politik dan Pemerintahan PP GP Ansor itu. ■ hal/sf

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menegur pemerintah daerah yang tidak menganggarkan anggaran daerahnya untuk insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) yang menangani pandemi Covid-19.

“Saya minta kepada Menteri Dalam Negeri agar segera memberikan teguran keras kepada puluhan kepala daerah yang sampai saat ini tidak menganggarkan insentif untuk tenaga kesehatan,” kata Luqman dalam keterangan pers yang diterima *Parlementaria*, Kamis (1/7). Menurutnya, teguran serupa juga penting diberikan kepada

ratusan kepala daerah yang belum merealisasikan insentif bagi nakes.

Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu menilai, apabila teguran keras tetap tidak digubris, maka dapat disimpulkan sejumlah kepala daerah tersebut telah menghalangi pelaksanaan pengendalian Covid-19. “Dan mereka dapat diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur pada Pasal 93 dan 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan,” ujarnya.

Luqman mengaku terkejut dan prihatin ketika dirinya mengetahui informasi adanya sejumlah daerah yang tidak menganggarkan insentif untuk nakes yang menangani Covid-19. Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat 68 kabupaten/kota yang tidak

Herman Hery Usul Bentuk Panja Penegakan Hukum Terkait Narkoba

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mengusulkan agar Komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum terkait Tindak Pidana Narkotika, dan akan menggelar pertemuan bersama sejumlah lembaga terkait untuk menyamakan visi pemberantasan narkoba.

“Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penegakan hukum, khususnya tindak pidana narkotika, saya sebagai Ketua Komisi III DPR RI akan menginisiasi dibentuknya Panja Penegakan Hukum terkait Tindak Pidana Narkotika,” kata Herman dalam keterangan pers yang diterima *Parlementaria*, Senin (28/6), hal ini terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung yang telah memvonis tiga terpidana kasus narkoba mendapatkan hukuman 15 tahun penjara dan tiga orang menerima hukuman 18 tahun penjara.

Padahal di tingkat Pengadilan Negeri (PN) Cibadak, keenam orang tersebut telah divonis hukuman mati. Menurut Herman, Komisi III DPR RI akan segera mengajak Kabareskrim Polri, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Dirjen Lembaga Masyarakat Kementerian Hukum dan HAM, serta penegak hukum lain untuk duduk bersama membahas masalah ini secara objektif.

Politisi PDI-Perjuangan itu menjelaskan, pembentukan panja itu diharapkan ada satu perspektif yang sama terkait visi dan misi untuk memberantas narkoba hingga ke akarnya. “Kami di DPR tentu juga siap jika dalam pembahasan ini dibutuhkan perubahan-perubahan legislasi,” ujarnya.

Herman juga menyampaikan keprihatinan terkait keringanan hukuman terhadap enam orang terpidana kasus narkoba jenis sabu-sabu seberat 402 kilogram tersebut. Ia menilai, keringanan hukuman tersebut tidak sejalan dengan kinerja baik Satgas Merah Putih dalam mengungkap kasus penyelundupan narkoba berskala besar.

“Keringanan hukuman yang didapat para terpidana kasus sabu-sabu 402 kilogram ini cukup memprihatinkan, bahkan bisa dibilang melukai rasa keadilan di masyarakat,” katanya. Menurut Herman, semua pihak harus menyadari betapa mengerikannya dampak peredaran narkoba.

”

KOMISI III DPR RI AKAN SEGERA MENGAJAK KABARESKRIM POLRI, KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN), DIRJEN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM, SERTA PENEGAK HUKUM LAIN

Ketua Komisi III DPR RI
Herman Hery. Foto: Dok/nvl



Legislator dapil NTT II itu mengatakan, dengan perhitungan bahwa 1 kilogram sabu bisa dipakai oleh empat ribu orang, artinya ada sekitar 1,6 juta anak bangsa yang terancam seandainya saja Satgas Merah Putih Polri tidak berhasil menggagalkan penyelundupan tersebut.

Herman menegaskan, diterimanya banding dari kuasa hukum para terpidana oleh Pengadilan Tinggi Bandung tentu disayangkan, karena membuat kinerja baik Satgas Merah Putih Polri selama ini menjadi tidak berarti hanya dalam sekejap. Menindaklanjuti kejadian tersebut, maka dirinya mendorong dibentuk Panja Penegakan Hukum terkait Tindak Pidana Narkotika Komisi III DPR RI. ■sf

Komisi IV Harap Karhutla Segera Tertangani

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan diperlukan koordinasi yang baik antar sektor sekaligus kesadaran yang tinggi dalam mengusahakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hal ini perlu jadi perhatian karena sebagian besar peristiwa karhutla, sekitar 70 persennya berawal dari luar kawasan hutan.

“Bila terjadi kebakaran hutan dan lahan, semua berkewajiban untuk penanggulangan ataupun pemadamannya lahan. Oleh karena itu perlu koordinasi antar sektor, juga harus kesadaran tinggi baik dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” jelas Anggia dalam RDPU Panja Pengendalian dan Penindakan Karhutla dengan sejumlah Pakar Pemerhati Karhutla, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (28/6).

Dirinya menerangkan koordinasi dan kesadaran perlindungan hutan juga harus beriringan dengan menciptakan perangkat hukum yang efektif dalam penanggulangannya. Akan tetapi diakui Anggia, implementasinya masih belum optimal sehingga diperlukan aspirasi serta kajian dari pakar, akademisi,

dan pemerhati guna meningkatkan efektivitas pengendalian serta penindakan karhutla.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI Darodi Wonodipuro menilai peran pemerintah dalam mengupayakan pencegahan dan penanggulangan karhutla terlihat belum jelas. Di sisi lain, ia pun menyayangkan alokasi anggaran penanggulangan karhutla baik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Pertanian yang minim. Ia berharap lewat rapat ini, baik pakar, akademisi dan pemerhati dapat memberikan pertimbangan dan rekomendasi.

Dalam rangka pencegahan dan pengendalian karhutla tersebut, Panja Komisi IV DPR RI mengundang Guru Besar Fakultas Kehutanan IPB Bambang Hero, Guru Besar Ilmu Tanah Azwar Maas, Aktivistis Yayasan Madani Berkelanjutan Nadia Hadad, Aktivistis GreenPeace Indonesia Leonard, Anggota Komite Lingkungan Hidup Kemitraan La Ode M. Syarif, serta Anggota Kaeom Telapak Abu Bakar. ■ ts/es

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini. Foto: Arief/mvi



KMP Yunicee Tenggelam, Komisi V Minta **Tim Fokus** **Evakuasi Penumpang**

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengucapkan turut berduka atas kejadian yang menimpa Kapal Motor Penumpang (KMP) Yunicee. KMP Yunicee diduga terseret arus dan tenggelam di perairan Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali, Selasa (29/6/2021), sekitar pukul 19.12 WITA. KMP Yunicee milik PT Surya Timur Line diinformasikan membawa 41 orang dengan 15 anak buah kapal (ABK).

Novita meminta agar tim evakuasi dapat bekerja cepat dan maksimal, terutama untuk menyelamatkan penumpang. "Saya turut berduka cita terhadap kejadian yang menimpa KMP Yunicee. Semoga penumpang dan kru kapal dapat segera diselamatkan. Saya meminta kepada Tim Evakuasi bekerja cepat dan maksimal. Kita fokus evakuasi", ungkap Novita dalam keterangan persnya, Rabu (30/6).

Politisi F-Gerindra ini mengungkapkan agar masyarakat tidak berspekulasi terhadap kejadian yang menimpa KMP Yunicee. Sekaligus meminta kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan berita yang belum terkonfirmasi. "Kita minta fokus evakuasi dulu, ada penumpang dan kru. Saya menghimbau untuk semuanya jangan berspekulasi. Kita tunggu detailnya nanti dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)," tutup Novita.

Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengonfirmasi sudah sebanyak 44 orang telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Sebelumnya

”

**KITA MINTA FOKUS
EVAKUASI DULU,
ADA PENUMPANG
DAN KRU. SAYA
MENGHIMBAU UNTUK
SEMUYA JANGAN
BERSPEKULASI.
KITA TUNGGU
DETAILNYA NANTI DARI
BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN
BENCANA (BNPB)**

Anggota Komisi V DPR RI
Novita Wijayanti. Foto: Arief/nvl



Kapolres Jembrana AKBP I Ketut Gede Adiwibawa mengatakan, dari proses evakuasi yang sedang berlangsung, tim telah menemukan 6 orang dalam keadaan meninggal.

Diketahui kronologi sementara insiden tersebut awalnya KMP Yunicee saat akan mendekati ke Pelabuhan Gilimanuk mengalami mati mesin. KMP Yunicee pun terseret arus sejauh 300 meter ke arah timur Pelabuhan Gilimanuk, Bali. ■ ann/sf

Garuda Harus Segera Selesaikan Masalah dengan *Lessor*

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menyatakan, masalah yang menjadi penyakit PT Garuda Indonesia selama bertahun-tahun adalah persoalan dengan jasa *leasing* (*lessor*). Menurutnya tidak ada jalan keluar selain Garuda Indonesia harus segera menyelesaikan permasalahannya dengan *lessor* untuk kembali bangkit menjadi maskapai nasional kebanggaan Indonesia.

“Apapun yang diperlukan dan sudah pasti tidak ada jalan keluar lainlah, *kemplang-kemplang deh* itu *lessor* dibanding menghadapi karyawan bilang kalau mereka dipecat,” tegasnya ketika memimpin rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR RI dengan jajaran direksi PT Garuda Indonesia di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (21/6).

Dikatakan politisi Partai Gerindra tersebut, selama ini hal yang membuat Garuda kalah dalam perampingan anggaran terhadap *lessor-lessor* tersebut adalah karena mereka memiliki kekuatan hukum yang tetap. Namun menurutnya, hal itu absolut jika memang tidak memiliki unsur korupsi. Apabila terdapat unsur korupsinya, maka kapanpun perjanjian tersebut dapat dibatalkan sepihak. Untuk itu Hekal menyetujui bahwa Garuda harus melakukan audit untuk tujuan tertentu agar hasilnya bisa dijadikan modal bernegosiasi dengan *lessor* di pengadilan internasional.

“Kalau BPK menyatakan bahwa memang ada kerugian negara di (perjanjian dengan *lessor*) situ, ya kita jadikan itu modal untuk di pengadilan di luar negeri. Karena saya semangatnya sama dengan teman-teman (Anggota Dewan) lainnya,” jelas Hekal.

”

APAPUN YANG DIPERLUKAN DAN SUDAH PASTI TIDAK ADA JALAN KELUAR LAINLAH, KEMPLANG-KEMPLANG DEH TU LESSOR DIBANDING MENGHADAPI KARYAWAN BILANG KALAU MEREKA DIPECAT

Selain itu, menurut politisi dapil Jawa Tengah IX tersebut, Garuda juga harus melakukan efisiensi dengan cara mengoptimalkan rute potensial dan melakukan perampingan terhadap kantor cabang yang bersifat *excessive* (berlebihan). Menurutnya, Garuda harus segera membuat rencana jangka pendek dalam taraf perampingan, agar bisa *survive* dalam masa pandemi ini.

“Saya lihat rencana Garuda ingin begini, ingin begitu. Itu kita pikirkan nanti kalau masa depannya sudah tanda-tanda cerahnya sudah mulai kembali. Hari ini kan kita masih *survival of the day*. Saya ingin direksi memahami bahwa kami ingin Garuda *survive*. Saya sendiri tidak ikhlas kalau Garuda tutup di republik ini,” tandasnya. ■ *er/sf*



Wakil Ketua
Komisi VI DPR RI
Mohamad Hekal.
Foto: Ojji/mvi



Komisi VII Tetapkan Erika Retnowati Jadi Kepala BPH Migas 2021-2025

Komisi VII DPR RI secara resmi telah menetapkan sembilan nama yang terpilih untuk mengisi posisi sebagai Kepala dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno menyatakan Erika Retnowati ditetapkan Komisi VII DPR RI menjadi Kepala BPH Migas periode 2021-2025. Erika terpilih dari total 18 calon Komite BPH Migas yang diajukan Presiden.



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno.
Foto: Jaka/nvl

Demikian disampaikan Eddy dalam siaran pers usai menghadiri penyelenggaraan Uji Kepatutan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*) terhadap calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas periode 2021-2025, di Ruang Rapat Komisi VII DPR RI, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (30/6), yang berlangsung dengan protokol kesehatan ketat dan berdasarkan Surat Presiden Nomor R-20/Pres/05/2022 per 3 Mei 2021.

“Uji Kepatutan dan Kelayakan atau *Fit and Proper Test* untuk Calon Kepala dan Anggota Komite BPH Migas telah rampung dan sudah ada nama-nama komite BPH Migas yang baru dengan Kepala BPH Migas terpilih yakni Ibu Erika Retnowati. Sekaligus, sebagai sejarah baru karena untuk pertama kalinya BPH Migas dipimpin oleh sosok perempuan. Kita membuat sejarah dengan memilih Kepala BPH Migas perempuan pertama,” ujar Eddy.

Politisi Fraksi PAN tersebut menuturkan, selain menunjuk Erika Retnowati sebagai Kepala BPH Migas, Komisi VII DPR RI juga telah menunjuk delapan anggota BPH Migas baru. Eddy pun memberikan rincian nama-nama delapan Anggota Komite BPH Migas terpilih, antara lain Abdul Halim, Basuki Trikora Putra, Eman Salman Arief, Harya Adityawarman, Iwan Prasertya Adhi, Saleh Abdurrahman, Wahyudi Anas dan Yapit Sapta Putra.

Eddy mengharapkan, Ketua dan Anggota BPH Migas terpilih dapat menyelesaikan berbagai macam

persoalan dan tantangan di sektor hilir migas. Di antaranya dengan mempercepat progres pembangunan infrastruktur gas bumi dan mengimplementasikan kebijakan BBM satu harga di wilayah 3T (terdepan, terpencil, tertinggal).

“Lalu, dapat mereduksi penggunaan bahan bakar seperti premium dan pertalite dengan penggunaan BBM berkualitas. Kemudian dapat menjawab tantangan zaman dimana dunia saat ini dalam proses transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Harapan kami dari Komisi VII DPR RI terhadap BPH Migas kedepannya dapat semakin maksimal dalam bekerja dan menjawab isu-isu tersebut,” tegas Eddy lebih lanjut.

Lebih lanjut, Eddy menjelaskan setelah penetapan sembilan nama terpilih Ketua dan Anggota Komite BPH Migas itu maka proses selanjutnya adalah daftar nama terpilih tersebut akan diserahkan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. “Sembilan nama terpilih Ketua dan Anggota Komite BPH Migas diajukan ke Pimpinan DPR untuk diserahkan ke Presiden,” pungkas legislator dapil Jawa Barat III itu.

Seperti diketahui, Komisi VII DPR RI telah melakukan proses Uji Kepatutan dan Kelayakan (*Fit and Proper Test*) terhadap calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas periode 2021-2025 total 17 calon anggota yang awalnya terdapat 18 calon, namun satu calon yang sedianya akan mengikuti *fit and proper test* tutup usia yakni Ferdi Novianto. Proses ini berlangsung selama tiga hari pada 28-30 Juni 2021.

Erika menggantikan posisi M. Fanshurullah Asa yang memasuki masa pensiun. Sebelumnya, wanita kelahiran Mataram 20 Juli 1963 itu menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM sejak 2015. Selain itu, Erika memiliki pengalaman sebagai akuntan pada Deputi Pegawai Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, BPKP Tahun 1992-2001. ■ pun/sf

Yandri Susanto: Segera Fungsikan Asrama Haji Jadi Tempat Isolasi Covid-19

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah segera memfungsikan asrama haji di seluruh Indonesia sebagai ruang isolasi pasien positif Covid-19 karena tingkat keterisian rumah sakit makin penuh dan terbatas. Diketahui terdapat 27 asrama haji yang dimiliki Indonesia.

“Ada sebanyak 27 asrama haji di seluruh Indonesia dengan total 3.465 kamar yang bisa difungsikan menjadi ruang isolasi untuk pasien COVID-19,” kata Yandri dalam keterangan persnya, Jumat (25/6).

Menurut Yandri, dengan tidak adanya jemaah haji tahun 2021, maka asrama haji bisa difungsikan sepenuhnya sebagai tempat isolasi pasien Covid-19. Ia mengatakan bahwa solusi menggunakan asrama haji bisa menghemat anggaran untuk isolasi pasien daripada menggunakan hotel

”

ADA SEBANYAK 27 ASRAMA HAJI DI SELURUH INDONESIA DENGAN TOTAL 3.465 KAMAR YANG BISA DIFUNGSIKAN MENJADI RUANG ISOLASI UNTUK PASIEN COVID-19,

yang membutuhkan biaya besar.

“Fasilitas asrama haji tentu baik dan layak untuk menjadi ruang isolasi pasien, apalagi sekarang seperti Wisma Atlet juga sudah makin penuh karena masuk harus antre,” ujar Yandri. Dana APBN yang disiapkan untuk pelaksanaan haji tahun 2021, kata Yandri, bisa dilakukan *refocusing* sebagian untuk penanganan Covid-19.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai, untuk mengubah fungsi asrama haji menjadi ruang isolasi membutuhkan fasilitas tambahan. Karena haji batal, dana APBN yang disiapkan untuk haji bisa dilakukan *refocusing* sebagian untuk pelayanan pasien Covid-19 di asrama haji.

“Saya juga meminta koordinasi lintas kementerian segera dilakukan untuk mengubah fungsi asrama haji menjadi ruang Isolasi. Dalam hal ini Kementerian Agama bersama Kementerian Kesehatan dan pihak lain yang terkait,” pungkasnya. Langkah itu, menurut dia, harus segera dibahas

dan dieksekusi lintas Kemenag dan Kemenkes. Selain itu, dibutuhkan koordinasi dengan pemerintah daerah. ■ tn/sf

Ketua Komisi VIII DPR RI
Yandri Susanto. Foto: Jaka/nvl



RS Penuh, Komisi IX Usul Telemedisin Isoman Covid-19

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengusulkan pemerintah membuat terobosan telemedisin untuk pasien isolasi mandiri Covid-19 karena situasi rumah sakit saat ini penuh. Charles mengatakan lonjakan kasus Covid-19

yang makin tinggi beberapa hari belakang telah membuat fasilitas kesehatan penuh.

Bahkan katanya ada pasien yang sampai dirawat di tenda-tenda darurat dan di atas mobil pikap yang terparkir di pelataran RS. “Menghadapi ancaman faskes kolaps tersebut, pemerintah perlu membuat

terobosan baru untuk tetap melayani kesehatan masyarakat,” kata Charles dalam keterangan persnya, Sabtu (26/6).

Terobosan tersebut lanjutnya bisa dengan memulangkan pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala ke rumah masing-masing untuk melakukan isolasi mandiri (isoman). Namun di sisi lain, pemerintah harus tetap menjamin pemberian layanan kesehatan secara gratis kepada pasien isoman tersebut, yakni lewat telemedisin.

“Singkatnya, *telemedicine* adalah penggunaan teknologi untuk memberikan layanan kesehatan secara jarak jauh. Dalam hal ini, dokter atau tenaga kesehatan di satu tempat menggunakan teknologi komunikasi untuk melayani pasien Covid-19 yang berada di tempat isoman masing-masing,” ucap politisi PDI-Perjuangan itu.

Telemedisin, kata Charles, tidak hanya konsultasi daring jarak jauh saja, tetapi juga disertai pemberian obat-obatan dan multivitamin, serta pemeriksaan PCR. Charles mengatakan semua layanan itu harus dilakukan dengan gratis kepada pasien yang tidak tertampung di fasilitas kesehatan pemerintah.

“Dalam pelaksanaannya, *telemedicine* bisa dilakukan terpusat di bawah komando Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang sudah berjejaring sampai ke daerah. Para relawan juga bisa ikut ambil bagian dalam *telemedicine* ini, misalnya untuk pengantaran obat-obatan dan sebagainya,” ujarnya.

Kemudian lanjut legislator dapil DKI Jakarta III itu, di samping terobosan lewat telemedisin, pemerintah juga harus terus berupaya menambah fasilitas-fasilitas isolasi dengan menggunakan gedung-gedung kosong milik pemerintah, seperti sekolah, gedung olahraga (GOR), dan sebagainya. Tempat-tempat tersebut untuk pasien yang tidak memungkinkan isolasi mandiri di tempat masing-masing. ■ sf

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris. Foto: Runi/nvl





Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi. Foto: Jaka/mvl

Perkaya Perspektif Keolahragaan, Panja RUU SKN Undang PPFi

Untuk memperkaya perspektif keolahragaan, Panitia Kerja (Panja) RUU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) Komisi X DPR RI mengundang Perkumpulan Pelatih Fisik Indonesia (PPFi). Suara dari para pelatih fisik perlu didengar untuk merumuskan RUU SKN yang sedang dibahas di Komisi X DPR RI.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI yang juga Ketua Panja RUU SKN Dede Yusuf, Kamis (24/6), mengatakan, sebagai organisasi profesi, PPFi sebetulnya masih asing,

Namun, masukan dari PPFi sangat penting terutama bagaimana para pelatih fisik ikut berperan dalam olahraga prestasi.

“Hari ini kita bersama PPFi. Pelatih fisik di Indonesia sangat dibutuhkan. Sejauh mana pelatih fisik dibutuhkan bagi atlet atau olahraga prestasi, olahraga pendidikan, atau olahraga masyarakat. Bahkan, saat ini banyak orang menggunakan personal *trainer* untuk menjaga kebugaran fisiknya,” tutur Dede.

Kebugaran fisik, kata politisi Partai Demokrat ini, penting untuk kesehatan

masyarakat. Sebagai atlet, dulu bertahun-tahun ia merasa punya fisik yang prima. Tapi, ketika tidak jadi atlet lagi, fisik mulai menurun. Ketika berbagai penyakit datang, di situlah semua orang baru sadar betapa pentingnya kebugaran fisik.

Ketua PPFi Kelana Sukma Anggun Jatnika dalam penjelasannya di hadapan Komisi X DPR RI mengatakan, sebelumnya memang belum ada perkumpulan pelatih fisik di Indonesia. Pada 2015 barulah komunitas pelatih fisik membentuk wadah yang kini bernama PPFi. Para pelatih fisik yang tergabung dalam PPFi sudah berprofesi sebagai pelatih fisik sejak 2004.

Organisasi ini dibentuk, urai Kelana, agar Indonesia punya pelatih fisik yang berstandar, punya level, dan mampu bersaing, selain juga ada wadah yang komprehensif untuk menampung para pelatih fisik tersebut. “Tahun 2015, kami membuat perkumpulan pelatih fisik yang bertujuan agar di Indonesia punya standar, wadah, dan *leveling* yang bisa bersaing sebagai pelatih fisik,” jelas Kelana. ■ mh/es

RUU HKPD Akan Sinergikan Kebijakan Fiskal Antara Pusat dan Daerah

Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto mengatakan bahwa Rancangan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD) akan memuat pengaturan yang menjembatani sinergi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah. Desentralisasi fiskal di Indonesia diarahkan untuk menjadi instrumen dalam mencapai tujuan bernegara.

“Sebagai instrumen fiskal, kebijakan desentralisasi fiskal menjadi alat pendanaan dalam penyelenggaraan fungsi dan kewenangan yang sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, dengan tetap menjaga keselarasan dan kesinambungan fiskal nasional melalui implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan UU Nomor 28 Tahun 2009,” kata Dito dalam rapat kerja virtual Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM guna mendengarkan pengantar pemerintah atas RUU HKPD, Senin (28/6).

Satu dekade pelaksanaan kedua UU tersebut, dinilai politisi Fraksi Partai Golkar itu telah terjadi dinamika perkembangan keadaan yang cukup signifikan dan sekaligus memunculkan berbagai tantangan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal. Terlebih selama pandemi Covid-19, berbagai isu krusial mengemuka mulai dari efektifitas dan kualitas belanja daerah, tingginya kebutuhan pendanaan infrastruktur daerah, perlunya upaya peningkatan kapasitas perpajakan daerah, ataupun sinergi kebijakan pusat dan daerah.

“Berbagai upaya perbaikan telah dilakukan secara parsial, antara lain melalui UU APBN, seperti, penggunaan

DAU (Dana Alokasi Umum) untuk infrastruktur, alokasi DAK (Dana Alokasi Khusus) berbasis usulan, aturan penggunaan DBH (Dana Bagi Hasil) Dana Reboisasi. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, perlu disusun kebijakan baru yang berorientasi pada peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pencapaian kinerja daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Dito.

“Pembahasan RUU HKPD ini diharapkan dapat mampu memberikan perbaikan yang signifikan terhadap pemerataan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat atas berbagai capaian indikator ekonomi dan sosial. Mulai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, angka harapan hidup, produk domestik bruto regional, dan ketimpangan kemampuan keuangan antar kelompok masyarakat,” tegasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, RUU HKPD akan mencakup pengembangan pajak daerah yang mendukung alokasi sumber daya nasional secara efisien. Dengan demikian, ketimpangan

kemampuan fiskal antara provinsi dan kabupaten/kota diharapkan akan semakin mengecil ke depannya. Pemerintah juga mendorong reformasi HKPD untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien.

Menkeu Ani menambahkan, reformasi HKPD juga diarahkan untuk meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui redesain transfer ke daerah, memperluas skema pembiayaan daerah, serta menerapkan skema sinergi pendanaan agar fokus pada penyelesaian program strategis. Selain itu, dilakukan upaya untuk mendorong peningkatan kualitas belanja daerah melalui kebijakan transfer ke daerah. ■

alw/sf

Ketua Komisi XI DPR RI
Dito Ganinduto.
Foto: Mentari/mvi



Banggar DPR Desak Pemerintah Lanjutkan Subsidi Listrik dan Elpiji



Anggota Banggar DPR RI Ecky Awal Mucharam.
Foto: Arief/nvl

Anggota Badan Anggaran DPR RI Ecky Awal Mucharam mendesak pemerintah tidak mengubah skema subsidi bagi pengguna listrik berkapasitas 450 VA, pada tahun mendatang. Sebab masyarakat dalam kategori tersebut, masih tergolong berpendapatan rendah sehingga masih tetap membutuhkan bantuan subsidi dari pemerintah.

“Pengguna listrik 450 VA, walaupun tidak masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), pada dasarnya adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan pemerintah, karena tidak punya keleluasaan secara finansial. Fraksi kami berpendapat pelanggan 450 VA harus tetap mendapatkan subsidi,” kata Ecky dalam rapat kerja Banggar DPR RI bersama pemerintah dan Bank Indonesia, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/6).

Tidak hanya itu, politisi Fraksi PKS itu juga mendesak pemerintah agar tetap melanjutkan subsidi gas elpiji 3 kilogram. Dengan begitu, harga eceran gas elpiji tetap terjangkau di tengah memburuknya kondisi ekonomi dan rendahnya daya beli masyarakat akibat pandemi. Namun pemerintah juga perlu mengatasi masalah penyaluran yang tidak tepat sasaran.

“Mendesak pemerintah agar penyaluran subsidi gas elpiji 3 kg dilakukan secara terbatas kepada

orang-orang yang berhak. Termasuk para pedagang kaki lima dan pelaku usaha ultra mikro. Jadi kita belum sependapat terkait transformasi subsidi secara perorangan, tetapi harus ditujukan kalangan yang perlu dibantu,” tegas Anggota Komisi XI DPR RI itu.

Senada dengan hal itu, Ketua Banggar DPR MH Said Abdullah juga sempat menyatakan bahwa pihaknya sepakat untuk tidak mencabut subsidi, terutama subsidi listrik bagi 24,7 juta penerima. Mengingat kondisi ekonomi yang menurun akibat pandemi seperti sekarang ini, masyarakat masih akan membutuhkan bantuan berupa subsidi dari pemerintah.

“Kita (Banggar DPR) memang sepakat bahwa kita tidak mencabut subsidi. Kita sepakat terhadap 24,7 juta penerima subsidi atau pengguna listrik berkapasitas 450 VA, subsidiya agar tepat sasaran,

”

**PEMERINTAH JUGA
PERLU MENGATASI
MASALAH PENYALURAN
YANG TIDAK TEPAT
SASARAN.**

itu memang kita yang mendorong pemerintah,” ungkap politisi PDI-Perjuangan itu saat memimpin rapat kerja tersebut.

Berdasarkan laporan Panja Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan dalam rangka pembicaraan pendahuluan RAPBN 2022, tercantum 4 catatan terkait arah kebijakan subsidi listrik untuk tahun mendatang. Menurut panja, reformasi tetap dapat berjalan dengan tidak mengubah skema subsidi listrik.

Keempat catatan panja itu, *pertama*, subsidi listrik hanya untuk golongan yang berhak. *Kedua*, subsidi listrik untuk rumah tangga diberikan secara tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan sesuai DTKS.

Selanjutnya, *ketiga*, transformasi subsidi listrik rumah tangga terintegrasi dengan program bantuan sosial dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan kondisi geografis. *Terakhir*, mendorong pengembangan energi baru terbarukan yang lebih efisien. ■ alw/sf

Ke bocoran BLT UMKM Terungkap, Legislator Sarankan Pemda Dilibatkan Susun Data Terintegrasi

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI

Anis Byarwati mengatakan ia sangat prihatin dengan laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2020 yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk UMKM yang tak tepat sasaran. Pemerintah pusat seharusnya menggandeng pemerintah daerah untuk melakukan pendataan secara serius dan berkala.

“Langkah ini harus secara konkret dilaksanakan mengingat urgensi dan situasi penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, khususnya untuk UMKM bangkit saat ini sangat bergantung pada ketersediaan data yang terintegrasi,” kata Anis dalam pernyataan tertulisnya yang diterima *Parlementaria*, Jumat (25/6).

Menurut Anis, program BLT memang untuk membuat pelaku UMKM terbantu, tapi belum cukup membuat UMKM bangkit lagi. “Bantuan produktif itu hanya mengatasi salah satu masalah UMKM. Selain memberikan BLT, pemerintah juga harus membantu UMKM dalam berbagai hal, baik fiskal maupun nonfiskal,” tambah Anis.

Anggota Komisi XI DPR RI itu mengungkapkan bahwa saat ini UMKM memerlukan bantuan secara komprehensif. “Misalnya mempermudah akses pasar melalui *digital platform*,

memudahkan akses bahan baku UMKM, serta lainnya,” tegas politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini.

Anis mendorong pemerintah untuk menjembatani komunikasi perusahaan besar dengan pelaku usaha kecil agar terjalin kemitraan. “Misalnya, UMKM memasok bahan baku ke perusahaan besar. Lalu perusahaan besar menjual produknya ke pasar lebih luas. Pola kemitraan seperti ini yang harus dikembangkan oleh pemerintah,” tutup legislator dapil DKI Jakarta I itu.

Pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (22/6), BPK menemukan beberapa permasalahan terkait pelaksanaan program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) pada kementerian atau lembaga. Salah satunya program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Dalam IHPS II Tahun 2020, disebutkan terdapat kebocoran penyaluran BPUM sebesar Rp1,18 triliun dan 418.947 penerima BPUM yang tak sesuai kriteria. ■ *alw/sf*



Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Anis Byarwati. Foto: Mentari/mvi

Fadli Zon: Negara-Negara Kawasan Regional Harus Saling Bantu Tangani Covid-19

Berbagai kebijakan Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menyatakan bahwa DPR RI sangat mengapresiasi langkah Uni Eropa (EU) untuk membantu setiap negara ASEAN dan di tingkat regional dalam mengatasi krisis kesehatan. Selain memperkuat sistem kesehatan, kerja sama kawasan regional juga penting untuk mengurangi dampak ekonomi dan sosial dari pandemi Covid-19.

“Sebagai dua blok regional paling maju di dunia, dengan kemitraan yang telah terjalin selama lebih dari 40 tahun, saya yakin akan lebih banyak kemajuan yang dicapai dalam hubungan kedua kawasan di masa depan. Tidak hanya secara bersama-sama mengatasi tantangan global, termasuk krisis kesehatan saat ini,” kata Fadli dalam dialog virtual antara AIPA dan Parlemen Uni Eropa (EP), Selasa (22/6).

Sayangnya saat ini kesenjangan vaksin secara global masih terjadi. Ini tentu berisiko memperpanjang pandemi, termasuk di Asia Tenggara. Saat ini, 75 persen vaksin dinikmati oleh 10 negara, dan hanya 0,4 persen dinikmati oleh negara berpenghasilan rendah. Sedangkan ASEAN sejauh ini baru memvaksinasi sekitar 7,8 persen dari populasinya. Kondisi ini, serta meningkatnya penularan Covid-19 di kawasan saat ini, terutama ASEAN yang membutuhkan lebih banyak vaksin secara tepat waktu.

“Posisi kita (Parlemen Indonesia) jelas seperti apa yang ada depan mata, adalah bagaimana menghadapi gelombang kedua Covid-19, jangan sampai *collaps health security* kita. Ke depan harus



Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dalam dialog virtual antara AIPA dan Parlemen Uni Eropa (EP). Foto: Jaka/nvl

memaksimalkan vaksin sebagai salah satu cara untuk mengendalikan vatalities, apalagi sudah cukup banyak mutasi variannya. Kita harus melihat apa yang di depan mata kita dulu, faktanya sekarang tingkat penularan sedang tinggi, penambahan kasus harian tinggi,” ungkap Fadli kepada **Parlementaria**.

Parlemen Indonesia juga memandang perlu untuk memberikan dukungan terhadap proposal yang diajukan oleh beberapa negara di WTO, mengenai pengabaian sementara ketentuan terkait *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement on Vaccine*. Melalui Konferensi Parlementer WTO, DPR RI telah menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut, sikap yang juga sejalan dengan Pemerintah Indonesia.

Dalam masa krisis ini, Fadli memandang penting bagi parlemen dan anggota parlemen untuk mendorong masing-masing pemerintah, untuk memastikan langkah-langkah yang

diambil pemerintah selaku pemangku kebijakan. Upaya yang tepat tentu akan menjamin berbagai hal. Tidak hanya ketersediaan vaksin, tetapi juga akses yang adil dan terjangkau untuk pasokan barang dan jasa kesehatan, peralatan medis, serta sebagai vaksin.

Sebagai informasi, Uni Eropa telah menjadi mitra ASEAN sejak tahun 1977 dan kedua belah pihak telah mengembangkan kerja sama di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. EU juga secara aktif mendukung integrasi ASEAN dan upaya membangun komunitas ASEAN.

Sebagai mitra dagang terbesar setelah Tiongkok, Uni Eropa dinilai menjadi *partner* penting bagi ASEAN. Kerja sama kedua belah pihak juga memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di kawasan, melalui berbagai bidang, antara lain infrastruktur konektivitas, logistik, regulasi, inovasi, mobilitas dan bantuan pendidikan. ■ **alw,ann/sf**

Perempuan Harus Ambil Peran Strategis dalam Pembangunan

Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Irine Yusiana Roba Putri mengatakan, perempuan saat ini harus jauh lebih aktif dan mengambil peran strategis dalam setiap aspek pembangunan. Mulai dari ekonomi, sosial, politik, lingkungan, olahraga, hingga ilmu pengetahuan dan penelitian.

Saat mengikuti *virtual teleconference* antara Parlemen Indonesia-Afganistan dengan tema 'Empowering Women And Supporting Peace Process', Irine mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi perempuan dari aspek kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. "Kami masih melihat ada disparitas gender

dalam hal pendapatan, keterampilan, pekerjaan, maupun akses," ucap Irine dalam pandangannya, Rabu (23/6).

Menurutnya diperlukan upaya peningkatan dalam hal pendidikan, sosialisasi, advokasi, dan fasilitasi untuk memperkuat peran perempuan. Untuk itu, keterwakilan perempuan dalam politik menjadi sangat penting sebagai pendobrak hambatan tersebut demi memastikan perumusan kebijakan yang responsif gender, termasuk dalam proses pembangunan.

"Untuk mempromosikan peran serta keterwakilan parlemen perempuan dan proses pengambilan keputusan lainnya, kami telah memperkuat kerangka hukum kami dengan menerbitkan UU Pemilu dan merumuskan *grand design* untuk

keterwakilan perempuan," sebut Irine.

Politisi F-PDI Perjuangan ini menjabarkan, DPR RI mengadopsi kuota 30 persen perempuan untuk diterapkan dalam pencalonan kursi pemilu, keanggotaan partai politik, dan keanggotaan lembaga Pemilu. Sehingga, ada peningkatan keterpilihan perempuan dalam Pileg 2019. Dari total 575 Anggota DPR RI, 118 di antaranya adalah perempuan. Ini merupakan peningkatan persentase yang signifikan dari 17,32 persen pada tahun 2014, menjadi 21 persen pada tahun 2019.

"Penggunaan kuota gender telah meningkatkan jumlah perempuan yang terpilih. Namun, menurut saya, untuk melampaui angka dan meningkatkan kemungkinan perempuan mencapai posisi kepemimpinan, pengembangan kapasitas perempuan adalah suatu keharusan," terangnya.

Legislator dapil Maluku Utara itu melanjutkan, DPR RI juga telah mengesahkan UU Pendidikan Nasional yang terdiri dari tiga pilar, yaitu peningkatan akses pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan dan tata kelola sistem pendidikan yang lebih baik. UU ini juga mengamanatkan untuk mengalokasikan 20 persen anggaran negara untuk pendidikan. Irine meyakini, UU ini akan berkontribusi menuju kesetaraan gender. ■ jk/es



Wakil Ketua BKSAP Mardani Ali Sera (kiri) dan Anggota BKSAP Irine Yusiana Roba Putri (kanan) usai *virtual teleconference* Parlemen Indonesia-Afganistan. Foto: Jaka/nvl

Pansus DPR Setujui Pembentukan Panja Bahas DIM RUU Otsus Papua dengan Pemerintah



Wakil Ketua Pansus Otsus Papua Agung Widyantoro. Foto: Agung/nvi

Pansus Otonomi Khusus (Pansus) Papua DPR RI menyetujui pembentukan Panitia Kerja (Panja) untuk membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus (RUU Otsus) Papua lebih lanjut bersama dengan pemerintah.

Demikian dipaparkan Wakil Ketua Pansus DPR RI Otsus Papua Agung Widyantoro saat menyampaikan kesimpulan Rapat Kerja Pansus DPR RI yang dipimpin Ketua Pansus Komarudin Wotarubin bersama dengan Mendagri Tito Karnavian, Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej, Wamenkeu Suahasil Nazara dan perwakilan DPD RI di Ruang Rapat Pansus, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (24/6).

"Pansus DPR RI bersama-sama pemerintah menyetujui penyerahan DIM dari Fraksi-Fraksi DPR RI dan DPD RI yang tergabung dalam Pansus DPR RI untuk dibahas bersama pemerintah sesuai dengan mekanisme pembahasan yang telah disetujui. Selanjutnya, Pansus DPR RI menyetujui pembentukan Panja untuk membahas DIM lebih lanjut bersama-sama dengan pemerintah," ujar Agung membacakan kesimpulan rapat.

Lebih lanjut, sambung Agung, Pansus DPR RI meminta agar pemerintah mengkoordinir dan menghadirkan juga pihak Kementerian dan Lembaga terkait antara lain yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Desa dan

PDTT, Kementerian PUPR, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM.

"Lalu, Kementerian Perdagangan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian BUMN, Kementerian Investasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian serta Kementerian Agama dalam pembahasan DIM di Panja," tutur politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Sementara itu, Ketua Pansus Otsus Papua DPR RI Komarudin Watubun mengingatkan pemerintah bersama Panja DIM RUU Otsus Papua nantinya membahas detail pasal 4 tentang kewenangan yang selama ini tidak dijabarkan dengan peraturan pemerintah yang baik. Mengingat, jika dapat dijabarkan dengan baik, maka kemudian oleh pemerintah daerah dapat diimplementasikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus), sehingga Otsus berjalan sesuai harapan.

"Ada satu kunci dalam RUU Otsus Papua yakni dalam pasal 4 tentang kewenangan yang selama ini tidak dijabarkan dengan peraturan pemerintah yang baik. Oleh karena itu, tolong dipertimbangkan untuk dibahas secara serius. Keputusan kita nanti bisa memperkuat nasionalisme Papua dalam NKRI. Kita mempunyai tugas penting untuk berbuat sesuatu yang terbaik untuk Papua," pungkas politisi PDI-Perjuangan itu. ■ pun,tn/sf

BK DPR Gelar FGD RUU Pelindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama



Kepala BK DPR RI Inosentius Syamsul menandatangani MoU BK DPR RI dengan IAKN Manado. Foto: Ayu/Nul

Kepala Badan Keahlian (BK) Sekretariat Jenderal DPR RI Inosentius Syamsul menilai masih terlalu dini untuk memutuskan apakah RUU tentang Pelindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama ini untuk dilanjutkan atau tidak dilanjutkan pembahasannya. Hal tersebut diungkapkannya usai *Focus Group Discussion* (FGD) yang digelar BK DPR RI dan Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado, Sulawesi Utara, dengan tema “Pelindungan atas Kebebasan Beragama dan Beribadat melalui Penyusunan RUU tentang Pelindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama”.

“Esensi dari FGD ini kami ingin mendapat masukan terkait RUU Pelindungan atas Kebebasan Beragama dan Beribadat melalui Penyusunan RUU tentang Pelindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama. Dimana, BKD sendiri merupakan *Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament*

Evidence Based Legislative Policy Making,” ujar Sensi, begitu Inosentius akrab disapa, di IAKN Manado, Sulawesi Utara, Selasa (29/6).

Untuk itu, lanjut Sensi, sebisa mungkin BK DPR RI menjaring masukan sebanyak-banyaknya dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan akademisi. Masukan tersebut akan diserahkan kepada Komisi DPR RI berikut berbagai catatan. Sehingga apakah RUU tersebut akan terus dilanjutkan atau tidak pembahasannya itu bukan wewenang BKD, melainkan sepenuhnya wewenang dari DPR RI.

Diakui Sensi, Pro dan kontra terhadap sebuah RUU itu hal yang wajar, tidak hanya RUU Pelindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama ini saja, melainkan juga RUU lainnya. Meski demikian, menurutnya, masih terlalu dini untuk memutuskan apa RUU ini terus dilanjutkan atau tidak, mengingat

perjalanan RUU yang masuk dalam prioritas prolegnas 2021 ini masih dalam tahap awal. Dengan kata lain RUU ini masih cukup jauh prosesnya.

“Sebagaimana kita ketahui, RUU ini secara politik sudah menjadi prioritas Prolegnas 2021. Dan DPR tentunya akan melihat dinamikanya, jika ada yang kontra atau tidak setuju dengan sebuah RUU, itu hal yang biasa dan wajar. Kita lihat nanti ke depan DPR meresponnya seperti apa,” ungkapnya.

Dalam FGD tersebut terungkap bahwa rektor dan ketiga pemateri dari IAKN Manado berharap agar RUU tersebut tidak dilanjutkan pembahasannya. Ada banyak hal yang melatar belakangnya, terutama terkait sudah adanya jaminan pelindungan dari UUD 1945 terutama pasal 29 tentang kebebasan memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sehingga tokoh agama pun kedudukannya sama di mata hukum serta mendapat jaminan pelindungan dari negara.

Ditambah lagi, tidak adanya definisi yang jelas tentang tokoh agama menjadikan RUU tersebut sangat lemah. Hingga akhirnya rektor IAKN Manado Jeane Marie Tulung serta ketiga pemateri dari IAKN berharap RUU tersebut tidak dilanjutkan lagi pembahasannya.

Usai FGD, juga berlangsung penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara BK DPR RI dengan IAKN Manado. Tujuannya, agar ke depan antara ke dua instansi ini bisa terus bekerjasama dan berkolaborasi di berbagai bidang penelitian *scientific*, yang pada akhirnya tentu demi kemajuan negara dan bangsa. ■ ayu/es

Setjen DPR RI Lepas 8 Pegawai Masuki Masa Purnabakti

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengapresiasi pengabdian dan loyalitas 8 pegawai negeri sipil (PNS) yang memasuki masa purnabakti. Dalam sambutannya saat melepas para pegawai yang memasuki masa pensiun di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (29/6) itu, ia berharap pegawai yang melalui masa purnabakti ini dapat melalui dengan suka cita.

"Walaupun di tengah pandemi yang mengkhawatirkan ini. Saya mewakili keluarga besar Setjen DPR RI mengucapkan selamat menempuh masa purna bakti. Berada di masa ini adalah sebuah pencapaian tertinggi. Semoga pengabdian dan loyalitas menjadi amal bakti. Kami berharap masa ini dilalui dengan suka cita," ungkap Indra. Dirinya pun meminta agar para pegawai yang akan pensiun nanti tetap aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan supaya semakin mengeratkan hubungan sosial.

Pada kesempatan yang sama, Nunu Nugraha mewakili para pegawai yang memasuki purnabakti pada bulan Juli nanti, mengucapkan rasa syukur atas

”

SAYA MEWAKILI KELUARGA BESAR SETJEN DPR RI MENGUCAPKAN SELAMAT MENEMPUH MASA PURNA BAKTI. BERADA DI MASA INI ADALAH SEBUAH PENCAPAIAN TERTINGGI. SEMOGA PENGABDIAN DAN LOYALITAS MENJADI AMAL BAKTI. KAMI BERHARAP MASA INI DILALUI DENGAN SUKACITA

kesempatan atas 33 tahun masa kerja. Baginya, ada banyak pengalaman yang mengesankan dan tak tergantikan selama bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI. Ia berharap ke depannya jalinan silaturahmi dengan keluarga besar Setjen DPR RI tetap terjaga.

Adapun pegawai di lingkungan Setjen DPR RI yang memasuki masa purnabakti adalah Plt Deputi Administrasi Nunu Nugraha Khuswara, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Zuredah Amnah, Verifikator Keuangan Muh. Salim, Verifikator Keuangan Saepul Amin, Pengelola Persidangan BAKN Adi Somara, Pengawas Teknis Keamanan PAMDAL Betong, Pengadministrasi Surat Endang Haris Kusuma, dan Teknisi Sarana dan Prasarana Taryo.

Pelepasan 8 pegawai Setjen DPR RI turut dihadiri oleh Deputi Bidang Persidangan Damayanti, Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul, Inspektur Utama Setyanta Nugraha, serta para Pejabat Eselon II, III, dan IV Setjen DPR RI, Ketua KORPRI DPR RI, Ketua P3S, Dharma Wanita, serta perwakilan PT Taspen. Acara pelepasan ini dilaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan ketat. Walaupun mengalami keterbatasan, acara diselenggarakan dengan memanfaatkan layanan teknologi informasi sehingga sebagian tamu undangan dapat mengikuti secara virtual. ■ ts/sf



Foto bersama Sekjen DPR RI Indra Iskandar serta pejabat di lingkungan Setjen DPR RI usai melepas para pegawai yang memasuki masa pensiun. Foto: Mentari/nvl

Puan Maharani Sampaikan Pentingnya Kekuatan Pertahanan dan Ancaman Serangan Siber di Sesko AU

Ketua DPR RI Dr. (H. C) Puan Maharani menegaskan, TNI harus membutuhkan sistem pertahanan negara yang memiliki strategi geopolitik, dukungan SDM, sarana dan prasarana alutsista mumpuni untuk mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara.

“Pertahanan negara, sebagaimana diamanatkan UU NO 34 Tahun 2004 tentang TNI, disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan,” kata Puan saat memberikan kuliah umum kepada Perwira Siswa (Pasis) angkatan ke-58 Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara (Sesko AU) di Jakarta, Senin (28/6).

Kedatangan Puan disambut Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fajar Prasetyo, yang dilanjutkan dengan menanam pohon bersama. Saat Puan memasuki ruang acara, terdengar tepuk tangan meriah dan lagu ‘Selamat Datang Pahlawan Muda’ yang dinyanyikan 127 perwira siswa Sesko AU, dan disaksikan secara virtual oleh ratusan perwira siswa Sesko AU lainnya.

Dalam paparannya, Puan menyampaikan, Presiden Soekarno adalah figur yang menekankan geopolitik sebagai faktor fundamental dalam sistem pertahanan Indonesia. Geografis Indonesia yang lautnya lebih luas menempatkan Indonesia sebagai penganut Archipelago Principles.

Dilanjutkan politisi PDI-Perjuangan itu, Presiden Soekarno dalam perayaan



Ketua DPR RI Dr. (H. C) Puan Maharani melakukan penanaman pohon sebelum memberikan kuliah umum kepada Perwira Siswa angkatan ke-58 Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara. Foto: Bonis/nvl

HUT AURI tahun 1951, mengatakan Indonesia harus memiliki Angkatan Udara yang kuat dan siap untuk menyejajarkan posisinya dengan angkatan bersenjata dunia. Kemudian, disampaikan Puan, pada HUT AURI tahun 1955, Presiden Soekarno juga mengatakan: “Kuasailah udara untuk melaksanakan kehendak nasional karena kekuatan nasional di udara adalah faktor yang menentukan dalam perang modern.”

“Tentang alutsista perlu dipikirkan jangka panjang bagaimana *legacy* yang bisa kita tinggalkan untuk Indonesia. Kebutuhan apa yang paling penting untuk menghadapi dinamika global,” tutur legislator dapil Jateng V itu.

DPR RI, kata Puan, menyadari TNI membutuhkan kekuatan dalam menghadapi berbagai ancaman dan meningkatkan kesejahteraan prajurit, termasukantisipasi terjadinya serangan *cyber*. Sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia, Indonesia juga rentan akan serangan *cyber*.

“DPR RI berkomitmen tinggi melalui fungsi anggaran, legislasi maupun pengawasan, untuk ikut mendukung upaya membangun kekuatan TNI dalam melaksanakan pertahanan negara, pembangunan postur pertahanan militer dengan pemilihan alutsista yang mutakhir, baru dan sesuai dengan kebutuhan,” ungkap Puan. ■ sf



RACHMAT GOBEL
WAKIL KETUA DPR RI
BIDANG KORINBANG



M. AZIS SYAMSUDDIN
WAKIL KETUA DPR RI
BIDANG KORPOLKAM



PUAN MAHARANI
KETUA DPR RI



SUFMI DASCO AHMAD
WAKIL KETUA DPR RI
BIDANG KOREKKU



A. MUHAIMIN ISKANDAR
WAKIL KETUA DPR RI
BIDANG KORKESRA

SEGENAP PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPR RI
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

mengucapkan :

SELAMAT HARI BHAYANGKARA



KE 75 TAHUN

1 JULI 1946 - 1 JULI 2021



@ DPR_RI



DPR RI

www.dpr.go.id



@ DPR_RI



DPR RI